

BAB IV

KONSEP PERANCANGAN

4.1. Konsep Makro

Konsep besar (makro) yang akan digunakan dalam pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Kendal yaitu dengan mengaplikasikan konsep pengembangan kawasan bahari terpadu yang berkelanjutan. Pengembangan kawasan bahari yang berkelanjutan ialah konsep dimana perhatian utama dalam pengembangan ini yaitu, keseimbangan antara pembangunan serta pengelolaan dengan aspek konservasi pada wilayah pesisir Kabupaten Kendal. Keseimbangan tersebut dapat dicapai tidak lepas dari campur tangan masyarakat setempat yang peduli dengan permasalahan pada wilayah tempat tinggal mereka. Sehingga selain berfokus pada penyelesaian masalah yang berkaitan dengan alam, konsep pengembangan kawasan bahari yang berkelanjutan ini juga berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Kendal.

Pembangunan kawasan bahari yang dilakukan tidak hanya semata untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi saja namun dapat menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil dan terjaganya daya dukung serta kualitas lingkungan secara seimbang tanpa mengorbankan kelangsungan pembangunan di masa depan. Dengan begitu perlunya suatu system pembangunan yang memuat 3 (tiga) dimensi pembagunan ekonomi, sosial, dan pembangunan lingkungan secara sekaligus (Saim, Sugandhy; 2007:2)

Pembangunan bahari berkelanjutan ini menjadi penting ketika sumber daya laut yang kurang dimaksimalkan akibat terlalu menekankan sumber daya di darat. Selain itu terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan pesisir seperti abrasi, pencemaran, deforestasi hutan bakau, dan permasalahan lingkungan lainnya yang berdampak pada keberlangsungan ekosistem wilayah pesisir.

4.1.1. Justifikasi Pemilihan Konsep Makro

Kabupaten Kendal adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kendal merupakan kabupaten yang terletak di pesisir Utara Pulau Jawa. Sebagai wilayah pesisir, tentunya Kabupaten Kendal memiliki potensi-potensi bahari yang dapat dikembangkan. Namun selain memiliki potensi, Kabupaten Kendal juga memiliki permasalahan fisik dan non-fisik yang harus segera diselesaikan. Maka dari itu dibutuhkan suatu konsep perancangan yang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Kendal tersebut.

Konsep yang digunakan ialah pengembangan kawasan bahari yang berkelanjutan. Konsep ini memiliki perhatian utama pada keseimbangan antara pembangunan serta pengelolaan dengan aspek konservasi pada wilayah pesisir Kabupaten Kendal. Konsep pengembangan kawasan bahari yang berkelanjutan memiliki 3 (tiga) prinsip utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiga prinsip tersebut sangat sesuai apabila diterapkan di Kabupaten Kendal. Hal ini juga didukung dengan

adanya potensi-potensi bahari Kabupaten Kendal, yang salah satunya ialah sebagai pengembangan prasarana transportasi laut.

Sebagai wilayah pesisir, Kabupaten Kendal memiliki potensi yang erat kaitannya dengan pengembangan akan ekosistem yang berada di laut maupun peralihan antara darat dan laut. Pemanfaatan ruang kawasan pesisir merupakan suatu proses yang akan membawa suatu perubahan pada ekosistemnya. Perubahan-perubahan tersebut akan membawa pengaruh pada lingkungan. Semakin tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan yang dilaksanakan berarti semakin tinggi tingkat pemanfaatan sumberdaya, maka semakin tinggi pula perubahan-perubahan lingkungan yang akan terjadi di kawasan pesisir (Dahuri, et al, 2001). Sehingga dibutuhkan suatu konsep pengelolaan melalui suatu pendekatan yang melibatkan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu oleh masyarakat setempat guna mencapai pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan proses yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (Brundtland, 1987).

4.1.2. Indikator Konsep

Salah satu pendekatan pembangunan yang dilakukan untuk pengelolaan lingkungan hidup adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Lebih jauh, dikatakan bahwa pada tingkat yang minimum, pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung semua kehidupan di muka bumi.

Pembangunan berkelanjutan sebagai suatu paradigma pembangunan baru yang menyepakati suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu terhadap pembangunan, yang menggabungkan sekaligus tiga pilar pembangunan, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), disebutkan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yang ketiga, yaitu mempercepat pemulihian ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan, maka kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya:

1. Mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;
2. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan;
3. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;

4. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal;
5. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
6. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan konservasi baru di wilayah tertentu; dan
7. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan wilayah pesisir maka diusung sebuah perencanaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Dahuri (2003) telah menulis indikator pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya keanekaragaman hayati laut, yang minimal harus meliputi 4 dimensi yaitu:

1. Ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka,
2. Sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat pesisir yang pada kenyataannya masih termasuk rendah,
3. Ekologi bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada pada kawasan pesisir dan mengurangi kerusakan yang ada akibat pemanfaatan sumberdaya yang ada dan,
4. Pengaturan (governance) bertujuan untuk menjaga kawasan pesisir agar tetap menuju kepada tujuan utama pembangunan sehingga dapat dikontrol.

Adapun indikator pembangunan berkelanjutan sumberdaya perikanan yang mendukung pembangunan kawasan pesisir secara berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 1
Indikator pembangunan berkelanjutan sumberdaya perikanan

Dimensi	Indikator
Ekonomi	Volume dan nilai produksi
	Volume dan nilai ekspor (dibandingkan dengan nilai totalekspor nasional).
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB
	Pendapatan nelayan
	Nilai investasi dalam bentuk kapal ikan dan pabrik pengolahan
Sosial	Penyerapan tenaga kerja
	Tingkat pendidikan
	Tingkat kesehatan
	Kependudukan
Ekologi	Komposisi hasil tangkap
	Dampak langsung alat tangkap terhadap habitat
	Perubahan luas area dan kualitas lingkungan habitat tangkapan
Governance	Ketaatan terhadap peraturan perundangan
	Transparansi dan partisipasi

Sumber: Dahuri (2003)

Dengan adanya indikator-indikator tersebut diharapkan pembangunan pada kawasan pesisir dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan pesisir terutama bagi para nelayan.

4.1.3. Penerapan Konsep

Dalam mengimplementasikan konsep Pembangunan Kawasan Bahari yang Berkelaanjutan di Kabupaten Kendal, maka setidaknya ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Identifikasi pengguna ruang dan kebutuhannya.
2. Penyusunan rencana tata ruang pesisir untuk menangani isu penggunaan pesisir yang tidak mengikuti rencana.
3. Penetapan sempadan pantai dan penanaman mangrove.
4. Pengendalian reklamasi pantai.
5. Pengetatan baku mutu limbah dan manajemen persampahan.
6. Penataan permukiman kumuh.
7. Perbaikan sistem drainase.
8. Penegakan hukum secara konsisten.

Tujuan penerapan konsep ini adalah mengatasi kerusakan wilayah pesisir yang semakin lama semakin parah, sehingga dengan menggunakan konsep pembangunan wilayah bahari yang berkelanjutan diharapkan akan terwujud suatu pembangunan wilayah pesisir di Kabupaten Kendal yang berkelanjutan. Adapun target pengelolaan adalah teratasnya permasalahan turunan dari konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir, melalui partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah secara terpadu, yang didukung penegakan hukum secara konsisten, yaitu:

1. Tersusun dan dipatuhi tata ruang wilayah pesisir ,
2. Terkendalinya reklamasi pantai,
3. Terkendalinya pencemaran perairan,
4. Tertatanya permukiman kumuh,
5. Kembalinya sempadan pantai dan rehabilitasi mangrove,
6. Terkendalinya masalah banjir dan abrasi serta sedimentasi

4.2. Konsep Meso

Konsep Meso yang diangkat pada perancangan kali ini merupakan konsep yang diturunkan dari konsep makro dan memiliki tujuan yang lebih fokus pada penyelesaian permasalahan yang ada pada lokasi perancangan meso. Konsep yang diangkat adalah Ketahanan Kawasan Pesisir Kendal.

4.2.1. Konsep Ketahanan Kawasan Pesisir Kendal (*Kendal Coastal Resilience*)

Ketahanan Kawasan Pesisir Kendal merupakan sebuah konsep yang diadaptasi dari sebuah konsep yang lebih umum yaitu Ketahanan Kota atau City Resilience namun lebih fokus dalam penanganan kawasan pesisir tepatnya di Kecamatan Rowosari dan Kaliwungu. Ketahanan kota adalah sebuah usaha bagaimana merancang dan mengembangkan kota yang mampu bertahan dari berbagai jenis ancaman yang berkembang, baik yang datang dari alam seperti bencana alam hingga yang berkembang akibat tindakan manusia. Sebuah resilience city juga mampu menjaga kestabilan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur pasca perubahan tertentu dengan tetap

mempertahankan fungsi, struktur, sistem, dan identitas sebelumnya. Selama beberapa dekade mendatang, kota-kota di dunia termasuk kota di daerah pesisir dihadapkan pada berbagai macam permasalahan mulai dari wabah penyakit, kemiskinan, kelaparan hingga bencana alam, oleh karena itu sebuah kota harus mampu bertahan dari masalah-masalah tersebut dengan menjadikannya sebagai kota yang tangguh baik dibidang fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi untuk diterapkan pada lokasi perancangan meso karena kesamaan tujuan yang akan dicapai pada perancangan kali ini melihat berbagai permasalahan yang ada di daerah pesisir.

4.2.2. Justifikasi Pemilihan Konsep Meso

Konsep Ketahan Kawasan Pesisir Kendal atau *Kendal Coastal Resilience* diangkat dengan mempertimbangkan isu dan permasalahan yang ada di lokasi perancangan meso yaitu Kecamatan Rowosari dan Kecamatan Kaliwungu. Berdasarkan perumusan yang dihasilkan dari telah data dan hasil observasi yang telah dilakukan, Kecamatan Rowosari dan Kaliwungu memiliki berbagai permasalahan dari segi fisik hingga sosial dan ekonomi. Permasalahan yang ada mulai dari abrasi, rawan banjir, *land subsidence*, hingga keberadaan spekulasi tanah terkait rencana pengembangan Kabupaten Kendal khususnya di Kecamatan Kaliwungu yang akan direncanakan menjadi Kawasan Industri Kendal. Permasalahan-permasalahan yang ada tersebut berujung pada kerentanan lingkungan fisik dan ekonomi masyarakat pesisir yang akan dapat diselesaikan dengan menerapkan konsep *Kendal Coastal Resilience*. Permasalahan fisik seperti abrasi dapat diselesaikan dengan indikator konsep *Infrastructure and Environment* dengan membangun *breakwater* dan penanaman mangrove pada pesisir pantai. Begitu pula dengan permasalahan masih banyaknya jalan yang rusak serta isu kerawanan banjir sangat mungkin untuk diselesaikan dengan penerapan indikator *Infrastructure and Environment*. Indikator-indikator lain pun dalam *Resilience City* dianggap mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di lokasi perancangan meso sehingga konsep ini dirasa cocok untuk diterapkan.

4.2.3. Indikator

Konsep *Kendal Coastal Zone* yang akan diterapkan pada perancangan lokasi perancangan terdiri atas 4 indikator konsep. Indikator tersebut adalah *Leadership and Strategy*, *Health and Wellbeing*, *Infrastructure and Environment*, dan *Economy and Society*. Keempat konsep tersebut telah dipilih dengan justifikasi mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Penjelasan dari indikator tersebut adalah:

1. Leadership and Strategy

Pengelolaan dan Manajemen Pengembangan Wilayah. Berkaitan dengan terciptanya tata kelola sistem pemerintahan yang terintegrasi, kepemimpinan dan manajemen pemerintahan dan

pembiayaan dan pembangunan yang efektif, dan pemberdayaan *stakeholder* atau pemegang kebijakan

2. *Health and Wellbeing*

Memastikan ketersediaan air, makanan, energi, tempat tinggal hingga sanitasi. Memastikan ketersediaan lapangan kerja serta perlindungan untuk lingkungan hunian yang aman dan sehat.

3. *Infrastructure and Environment*

Terciptanya pelayanan sarana dan prasarana yang mencukupi, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas serta perlindungan lingkungan terhadap kerentanan fisik alamiah

4. *Economy and Society*

Memastikan berkembangnya ekonomi dan kesejahteraan warga dengan stabil serta kondisi sosial lingkungan yang saling berinteraksi dan saling mendukung

4.2.4. Penerapan Konsep

Berdasarkan keempat indikator yang digunakan untuk penerapan konsep meso diharapkan mampu menyelesaikan berbagai isu dan masalah serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh lokasi perancangan meso.

Tabel IV. 2
Penerapan Konsep

Indikator	Potensi	Masalah	Penerapan
Leadership and Strategy	1.Telah memiliki rencana pengembangan kawasan 2.Pantai Cahaya dan Pantai Sendang Sikucing telah memiliki pengelola	1. Pengelolaan Pantai Sendang Sikucing belum professional 2. Terdapat penggunaan lahan yang tidak sesuai RTRW	1. Penyusunan sistem manajemen pembangunan yang mampu memastikan pembangunan dapat berjalan dengan sumber pembiayaan yang baik 2. Penyusunan sistem tata kelola pemerintahan yang professional dan memiliki integritas
Health and Wellbeing	1.Masih terdapat banyak lahan hijau sebagai sumber udara bersih	1.Masih terdapat pemukiman kumuh yang ditemui di lokasi perancangan	1. Penataan pemukiman dengan menggunakan kriteria terukur sehingga rumah yang akan dibangun kemudian dapat menyesuaikan dengan aturan yang ada 2. Pengadaan

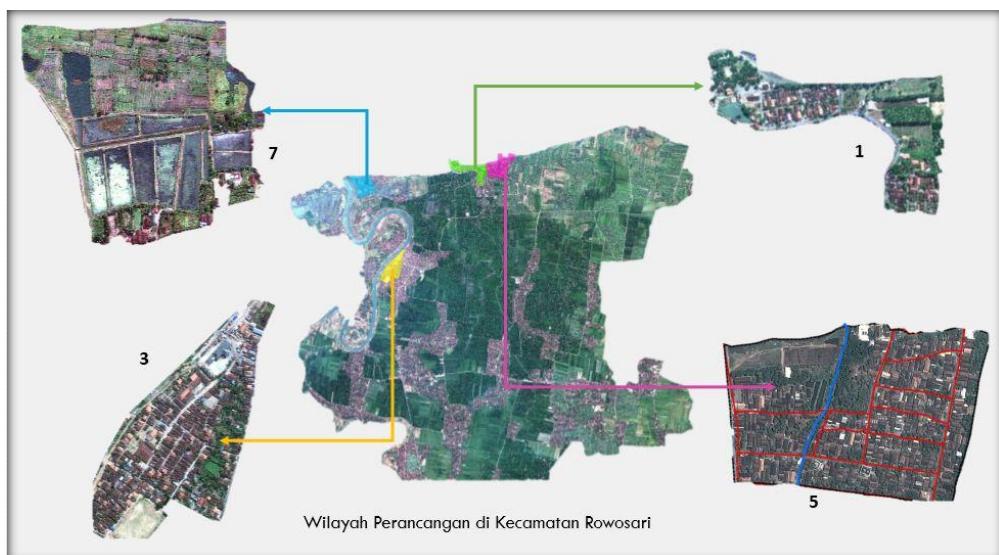


			tempat atau gerobak sampah yang menampung sampah dari lokasi perancangan sehingga tidak mengotori pemukiman
Economy and Society	1. Masyarakat masih memegang teguh budaya yang dimiliki 2. Memiliki berbagai potensi pengembangan ekonomi yang mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan di lokasi perancangan	1. Lahan tambak yang kurang produktif 2. Masih berlakunya sistem "Ijon" yang merugikan petani tambak 3. Kurang optimalnya peran komunitas nelayan dan petani tambak serta pemerintah	1. Penyediaan lapangan pekerjaan yang terdiversifikasi 2. Optimalisasi peran komunitas dalam pengembangan kawasan terutama dalam segi pemodaluan 3. Penataan sistem tata niaga dan penyediaan sarana penjualan yang efektif bagi petani
Infrastructure and Environment	1. Sarana pendukung perkotaan sudah tergolong lengkap	1. Ruas jalan yang rusak 2. Saluran drainase yang tidak mampu menampung debit air saat hujan 3. Masih terdapat MCK di bantaran yang mencemari lingkungan 4. Masalah abrasi dan reklamasi pantai 5. Sedimentasi kawasan pesisir 6. Bahaya <i>land subsidence</i> terkait penggunaan sumur artesis	1. Perbaikan ruas jalan 2. Perbaikan dan pembangunan jaringan drainase 3. Sistem sanitasi yang lebih ramah lingkungan 4. Pembangunan <i>breakwater</i> dan penanaman <i>mangrove</i> 5. Perencanaan jaringan PDAM hingga kawasan pesisir untuk mengurangi pengambilan air tanah berlebihan

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 5B, 2015

Penerapan konsep meso pada lokasi perancangan akan dibagi menjadi 4 wilayah yang lebih kecil pada masing-masing kecamatan yang menjadi lokasi perancangan yaitu Kecamatan Rowosari dan Kecamatan Kaliwungu. Masing-masing wilayah memiliki luas sebesar ±10 Ha dan akan dirancang terintegrasi pada tiap kecamatan. Integrasi ini akan disesuaikan dengan potensi dan masalah yang ada di masing-masing lokasi perancangan. Kelompok 1 dan 5 akan mengembangkan kawasan pariwisata dengan fokus yang berbeda dimana Kelompok 1 mengembangkan pariwisata dan kampong nelayan yang terdapat TPI sementara kelompok 5 akan mengembangkan pariwisata buatan

dan UMKM untuk mengembangkan ekonomi masyarakat yang salah satu komoditinya didatangkan dari Area Kelompok 1. Integrasi pariwisata juga dilakukan dengan Kelompok 7 yang mengembangkan minawisata serta wisata kapal laut. Ketiga kelompok sama-sama akan mengintegrasikan perencanaan fisik untuk mengatasi abrasi di sepanjang pesisir Kecamatan Rowosari. Sementara itu, integrasi dengan Kelompok 3 akan dilakukan dengan mengembangkan sarana dan prasarana terutama jalan karena lokasi perancangan Kelompok 3 berada pada tempat pusat Kecamatan Rowosari yang didalamnya terdapat pasar dan sekolah yang menjadi pusat aktivitas warga sehingga pasti berhubungan dengan aktivitas warga tiap-tiap lokasi perancangan di Kecamatan Rowosari



Sumber: Pengolahan Data Citra, 2015

Gambar 4. 1
Peta Lokasi Perancangan Meso

4.3. Konsep Mikro

Konsep mikro merupakan turunan dari konsep messo dan konsep makro dalam perancangan kawasan bahr terpadu dengan lingkup perencanaan yang lebih kecil yaitu berada Desa Sendang Sikucing, Kecamatan Rowosari. Konsep umum perancangan dan perencanaan yang diangkat adalah Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Konsep ini yang merupakan kebijakan pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). **Berdasarkan konsep ini, kemudian dijabarkan menjadi konsep khusus perancangan kawasan di Desa Sendang Sikucing dengan nama Sentra Ekonomi Sendang Sikucing “SEKOCI”**

4.3.1. Konsep SEKOCI berlandaskan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) SEKOCI

Menurut Ambaryanto dan Denny, 2012 konsep PDPT merupakan sebagai sebuah kebijakan, yang memiliki makna strategis. Pertama, PDPT merupakan implementasi konkret dari 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu 2 tahun 2011-2014. Selain itu, PDPT merupakan implementasi kebijakan presiden terkait peningkatan dan perluasan program pro-rakyat (khususnya program peningkatan kehidupan nelayan). Kedua, PDPT merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal

menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir/nelayan berbasis masyarakat, kegiatan yang menghasilkan keluaran (*output*) secara fisik yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat, pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat menemukan cara-cara pemecahan masalah dan kebutuhannya sendiri dengan memberdayakan segenap potensi yang ada, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan.

Penyusunan Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh mempunyai tujuan dalam mengidentifikasi potensi ,permasalahan desa-desa pesisir dan pemilihan desa sebagai lokasi program PDPT sebagai data dasar dalam penyusunan Desa Pesisir Tangguh terhadap ancaman bencana alam. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah teridentifikasikannya potensi, permasalahan desa-desa pesisir dan pemilihan desa sebagai lokasi program PDPT sebagai data dasar dalam penyusunan Desa Pesisir Tangguh terhadap ancaman bencana alam.

Konsep SEKOCl sendiri merupakan salah satu inovasi penerapan dari PDPT yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi perancangan. Konsep SEKOCl bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir Sendang Sikucing terutama di bidang ekonomi dan ketahanan fisik lingkungan. Konsep SEKOCl merupakan akronim dari Sentra Ekonomi Sendang Sikucing. Konsep perancangan ini menekankan pada optimalisasi potensi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh lokasi perancangan. Potensi perekonomian ini dilihat dari lokasi wilayah perancangan yang diapit oleh dua objek wisata yang mendatangkan banyak pengunjung. Oleh karena itu, hal ini dapat dilihat menjadi potensi wilayah studi untuk dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa untuk mendukung kegiatan pariwisata dalam bentuk pertokoan, rumah makan, dan industry rumah tangga. Sementara itu, konsep kelestarian lingkungan yang diacu oleh PDPT diterapkan melalui penataan barrier sungai dan alat pemecah ombak untuk mengurangi tingkat abrasi. Selain itu juga akan dilakukan penataan jaringan drainase dan sanitasi.

4.3.2. Justifikasi Pemilihan Konsep Mikro

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kawasan PDPT dikatakan obyek pengembangan desa tangguh apabila mencakup 3 (tiga) hal yang secara fisik merupakan satu hamparan yang terdiri atas desa-desa dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan sosialekonomi berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan dalam satu kesatuan ekologis atau satu kesatuan sosial-budaya, atau satu kesatuan sosial-ekonomi.

Kawasan Perancangan di Desa Sendang Sikucing, memiliki berbagai isu dan permasalahan yang ada yang menjadi latar belakang diangkatnya konsep PDPT tersebut. Berdasarkan hasil telaah data dan observasi, Kawasan Perancangan di Desa Sendang Sikucing memiliki berbagai permasalahan fisik, ekonomi, dan sosial-budaya. **Adapun indikator yang digunakan dalam menentukan Desa Sendang Sikucing dan Wilayah Perancangan untuk menjadi lokasi studi adalah**

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil):

1. Terletak dalam Satu Hamparan Wilayah Perencanaan

Sebagaimana yang diketahui, Desa Sendang Sikucing yang terletak di Kecamatan Rowosari serta berbatasan langsung dengan laut jawa merupakan wilayah perencanaan dari Kabupaten Kendal. Hal ini dapat dilihat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kendal (Perda No.20 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Kendal 2011-2031)

2. Kondisi Lingkungan yang Kumuh

Berdasarkan hasil peta tata guna lahan, proporsi lahan permukiman mendominasi penggunaan lahan di Kawasan Perancangan sebesar 52%, hal ini menandakan bahwa kawasan perancangan merupakan daerah permukiman. Berdasarkan hasil observasi kondisi permukiman yang ada di kawasan perancangan belum direncanakan secara baik, sehingga masih banyak ditemukan kawasan dan lingkungan kumuh, seperti sanitasi yang belum memadai (masih menggunakan sungai), kondisi bangunan yang semi permanen dan tidak layak huni berdasarkan standar rumah minimal, belum adanya salauran drainase, dan sebagainya.

3. Terdapat Banyak Pengangguran dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Berdasarkan data sekunder, bahwa penduduk Kecamatan Rowosari sebanyak 6744 RT prasejahtera dari 15219 total RT. Hal ini menandakan bahwa 44,31% penduduk masih belum sejahtera. Data ini juga menandakan tingkat pekerjaan masyarakat di kawasan perancangan Desa Sendang Sikucing tidak tetap, seperti nelayan, petani tambak, petani sawah, dan hanya sebagian kecil warga bekerja sebagai buruh dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah.

4. Tedapat Degradasi Lingkungan dan Rawan Bencana Pesisir

Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk setempat, yaitu Bapak Suwito yang bekerja sebagai petani sawah dan nelayan, menyatakan bahwa adanya obyek wisata yang mengurug pasir serta tidak adanya pemecah gelombang, abrasi semakin meningkat. Abrasi ini mengakibatkan rusaknya sawah padi milik masyarakat yang berdekatan dengan tepi pantai. Selain itu, berdasarkan peraturan daerah (Perda No.20 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Kendal 2011-2031) Kecamatan Rowosari termasuk kedalam kawasan Reboisasi dan Konservasi kawasan sabuk pantai yang rawan abrasi.

5. Tingkat Pelayanan Prasarana Dasar Rendah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, sebagian kondisi prasarana dasar masih rendah seperti, jalan yang rusak/ berlobang, drainase yang tidak memadai, sanitasi yang buruk (menggunakan sungai). Tingkat pelayanan prasarana yang rendah diharapkan menjadi indikator dalam merencanakan kawasan pesisir serta memberi keluaran yang secara fisik dapat memberi manfaat yang riil seperti perbaikan jalan dan pembangunan sarana prasarana

6. Adanya potensi unggulan kawasan pesisir

Desa Sendang Sikucing memiliki potensi kelautan dan pariwisata pantai yang terkenal, yaitu pantai Sendang Sikucing dan Pantai Cahaya. Potensi kelautan dan perikanan, merupakan potensi utama dalam mata pencaharian masyarakat Desa Sendang Sikucing dalam mendukung perekonomian. Kurangnya kemandirian masyarakat dalam mengelola hasil perikanan, menyebabkan tidak berkembangnya potensi kelautan dan perikanan. Selain itu, adanya potensi kawasan pantai, sebenarnya dapat dimanfaatkan masyarakat dalam peluang ekonomi, seperti souvenir, penginapan, oleh-oleh berupa olahan hasil laut, dsb.

Selain itu, adanya rencana pengembangan potensi kawasan pesisir/ bahari Kabupaten Kendal, maka berdasarkan RTRW Kabupaten Kendal Desa Sendang Sikucing direncanakan sebagai kawasan potensi perikanan dengan jenis jenis kawasan pengembangan budidaya air payau dan kawasan pengembangan budidaya laut (Pasal 38, Perda No.20 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Kendal 2011-2031). Selain itu, Desa Sendang Sikucing juga direncanakan sebagai kawasan pariwisata dengan jenis Pariwisata Alam dengan obyek Pantai Sendang Sikucing dan Pariwisata buatan dengan obyek Pantai Cahaya/Atraksi Lumba-lumba (Pasal 41, Perda No.20 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Kendal 2011 – 2031).

Program-program pemerintah dalam mengembangkan potensi Desa Sendang Sikucing juga diiringi dengan mengatasi permasalahan fisik Alamiah Desa Sendang Sikucing. Permasalahan fisik alamiah yang ada di Desa Sendang Sikucing yang utama adalah abrasi. Pemerintah melalui kebijakannya merencanakan Kecamatan Rowosari dan Desa Sendang Sikucing, khususnya sebagai kawasan Reboisasi dan Konservasi kawasan sabuk pantai yang rawan abrasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal, maka diangkatlah konsep Permukiman dan Wariwisata Pesisir Tangguh Terpadu yang merupakan turunan dan spesifikasi konsep PDPT. Konsep ini diharapkan mampu menyelesaikan isu dan masalah serta mampu mengembangkan potensi yang ada di Kawasan Perancangan dengan optimal

4.3.3. Indikator Konsep

Konsep Desa Tangguh dengan tema Sentra Ekonomi Sendang Sikucing “Sekoci” yang akan diterapkan pada perancangan wilayah studi terdiri atas 3 indikator konsep. Indikator tersebut adalah *Leadership and Strategy*, *Infrastructure and Environment*, dan *Economy and Society*. Indikator *Health and Well-Being* tidak termasuk dari Konsep Perencanaan Desa Sendang Sikucing dikarenakan tidak terdapatnya isu dan masalah pada lokasi perencanaan. Ketiga konsep tersebut telah dipilih dengan justifikasi mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Penjelasan dari indikator tersebut adalah

1. *Leadership and Strategy*

Pengelolaan dan Manajemen Pengembangan Wilayah. Berkaitan dengan terciptanya tata kelola sistem pemerintahan yang terintegrasi, kepemimpinan dan manajemen pemerintahan dan

pembiayaan dan pembangunan yang efektif, dan pemberdayaan *stakeholder* atau pemegang kebijakan

2. *Infrastructure and Environment*

Terciptanya pelayanan sarana dan prasarana yang mencukupi, peningkatan aksesibilitas dan mobilitas serta perlindungan lingkungan terhadap kerentanan fisik alamiah

3. *Economy and Society*

Memastikan berkembangnya ekonomi dan kesejahteraan warga dengan stabil serta kondisi sosial lingkungan yang saling berinteraksi dan saling mendukung. Selain itu menciptakan ruang interaksi warga (balai pertemuan dan lokasi penjemuran ikan).

4.3.4. Penerapan Konsep

Berdasarkan 9 indikator yang digunakan untuk penerapan konsep mikro diharapkan mampu menyelesaikan berbagai isu dan masalah serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh wiayah studi mikro.

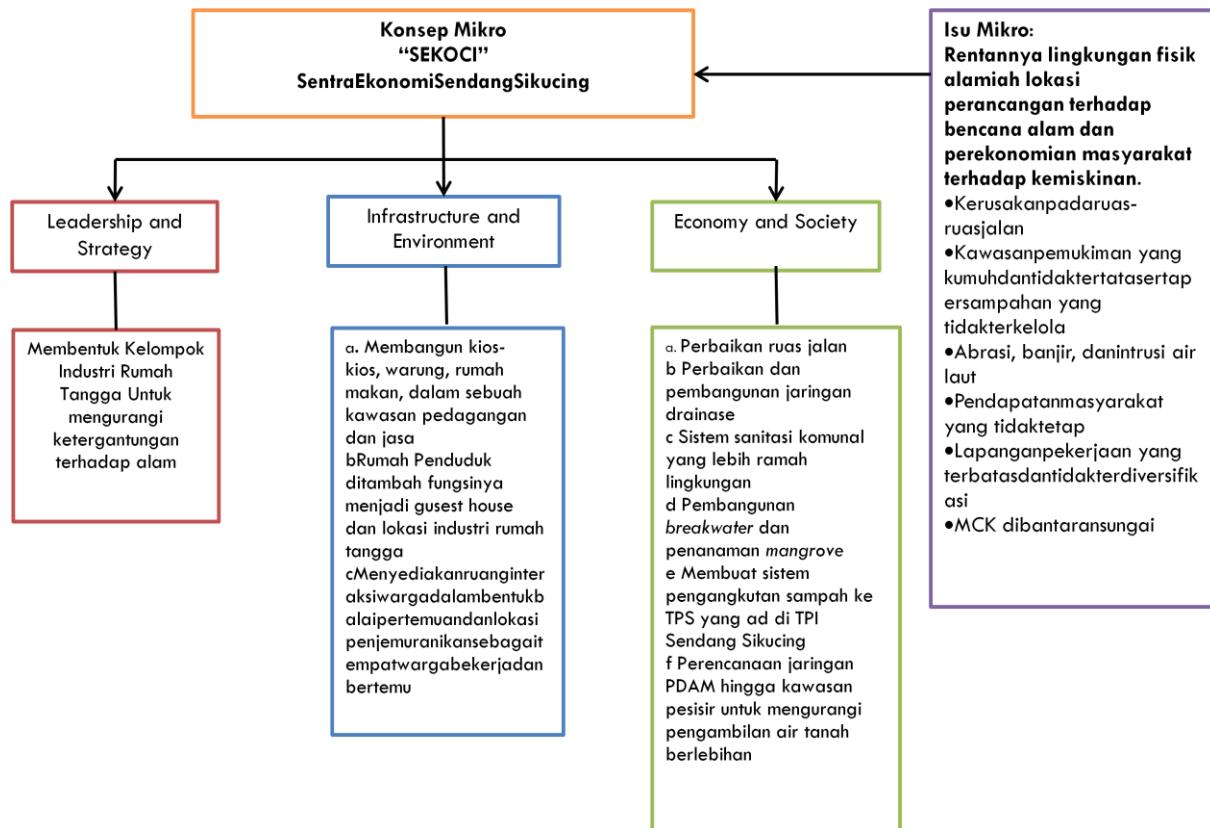
Tabel IV. 3
Penerapan Konsep Berdasarkan Potensi dan Permasalahan di Lokasi Perancangan

Indikator	Potensi	Masalah	Penerapan
<i>Leadership and Strategy</i>	-	1. Penduduk masih sangat bergantung pada hasil alam, contoh: Petani Nelayan tangkap	1. Memebentuk Kelompok Industri Rumah Tangga Untuk mengurangi ketergantungan terhadap alam
<i>Economy and Society</i>	1. Obyek Wisata Pantai Sendang Sikucing dan Pantai Cahaya "The Sea" 2. Embrio Pengolahan Ikan 3. Masyarakat memiliki budaya kebersamaan, seperti gotong royong	1. Pendapatan Masyarakat berada di bawah Upah miniman Regional (<Rp 1.200.000,00)	1. Membangun kios-kios, warung, rumah makan, dalam sebuah kawasan pedagangan dan jasa 2. Rumah Penduduk ditambah fungsinya menjadi guest house dan lokasi industri rumah tangga
<i>Infrastructure and Environment</i>	1. Masih banyak terdapat RTH>40% 2. Masih banyak terdapat pohon sebagai sumber udara bersih	1. Hampir seluruh Ruas jalan di lokasi perancangan yang rusak (berlubang) menganggu aktivitas wisata dan keseharian warga 2. Sering terjadi banjir 3. MCK masih di sungai 4. Masalah abrasi dan reklamasi pantai 5. Sekitar 78% masyarakat masih menggunakan air tanah sehingga berpotensi	1. Perbaikan ruas jalan 2. Perbaikan dan pembangunan jaringan drainase 3. Sistem sanitasi komunal yang lebih ramah lingkungan 4. Pembangunan breakwater dan penanaman mangrove 5. Membuat sistem pengangkutan sampah ke TPS

		terjadinya intrusi air laut 6. Sampah masih dibakar	yang ad di TPI Sendang Sikucing 6. Perencanaan jaringan PDAM hingga kawasan pesisir untuk mengurangi pengambilan air tanah berlebihan
--	--	--	--

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 5B, 2015

Adapun bagan penerapan Konsep SEKOCl adalah sebagai berikut:



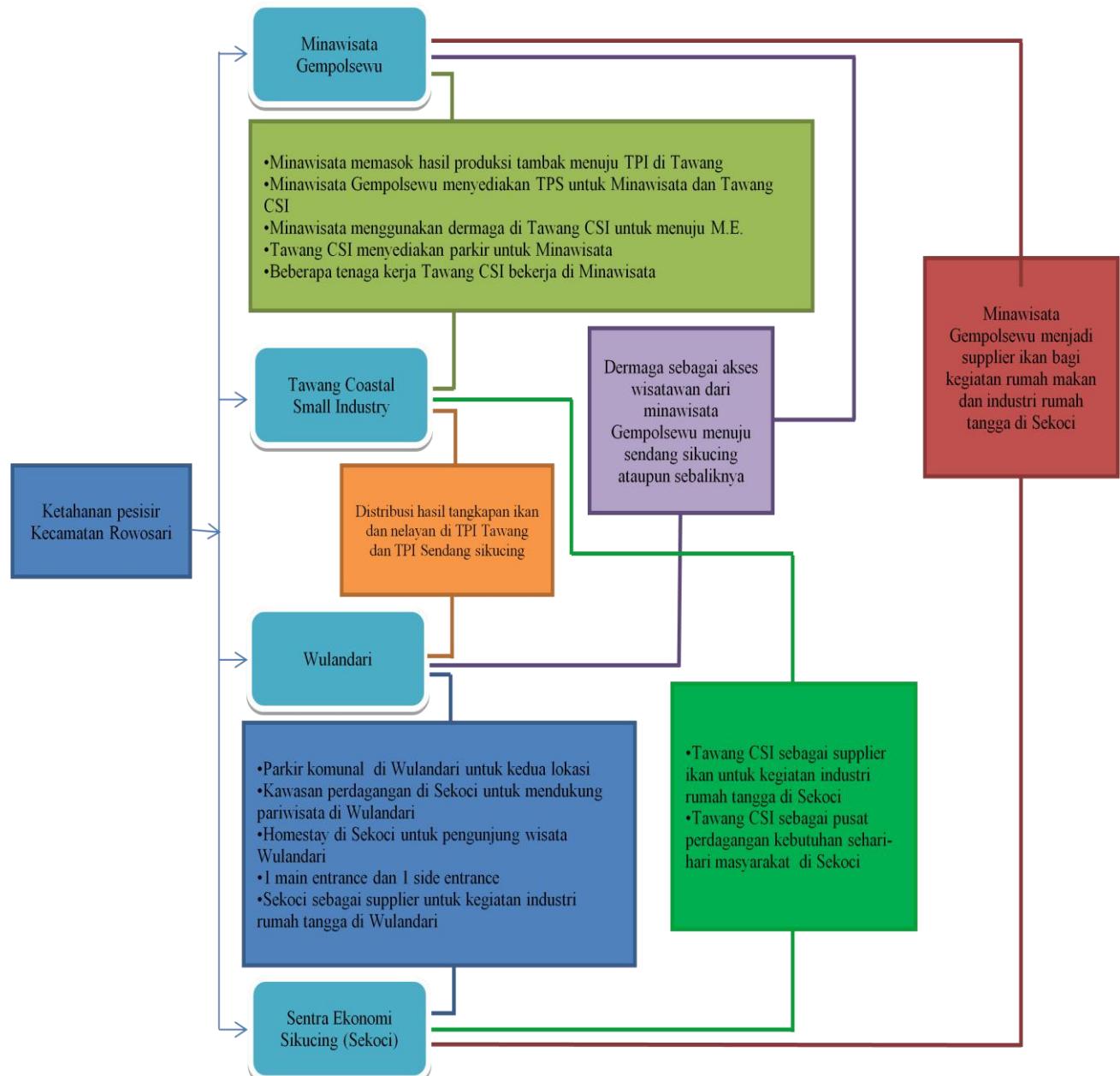
Sumber: Hasil Analisis Kelompok 5B, 2015

Gambar 4. 2
Bagan Penerapan Konsep Mikro

4.4. Integrasi Konsep Antar Kecamatan Brangsong

Penerapan Konsep mikro pada lokasi perancangan ± 10 Ha yang akan dirancang terintegrasi dengan kelompok-kelompok lainnya di Kecamatan Rowosari. Bentuk integrasi yang terjadi dalam perancangan SEKOCl antara lain adalah dengan konsep pariwisata WULANDARI pantai Sendang Sikucing yang dirancang kelompok 1B. Bentuk penerapan dari integrasi ini adalah penyediaan tempat parkir Pantai Sendang Sikucing yang akan digunakan bersama-sama antara SEKOCl dan WULANDARI dan penyediaan tempat pembuangan sampah (TPS) di Lokasi Perancangan Kelompok 1B. Selain itu dilakukan juga penyediaan penginapan dan sarana perdagangan untuk mendukung

kegiatan wisata WULANDARI dan The Sea. Bentuk integrasi lain adalah industri pengolah ikan yang terdapat di SEKOCI bahan baku ikannya bersumber dari PPI di wilayah perancangan WULANDARI dan MINASEWU. Ikan yang bersumber dari WULANDARI adalah ikan laut sementara dari MINASEWU merupakan ikan air tawar yang dihasilkan oleh tambak yang dimiliki oleh MINASEWU. Integrasi antara SEKOCI dan TAWANG CSI adalah sebagai pusat kegiatan jual beli kebutuhan sehari-hari warga di SEKOCI. Berikut adalah bagan interaksi antara 4 konsep perancangan di Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal:



Sumber: Hasil Analisis Kelompok 1B, 3B, 5B, dan 7B, 2015

Gambar 4. 3
Bagan Integrasi Konsep Kecamatan Rowosari